

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang gencar untuk mengembangkan konsep *smart city* di kabupaten dan kota dalam beberapa dekade terakhir. *Smart city* merupakan perwujudan dari Visi Indonesia Emas 2045 yang memiliki tujuan agar kualitas hidup masyarakat meningkat (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Membangun *smart city* berdaya saing berbasis IT termasuk dalam RPJMN tahun 2015-2019 pilar ke III KSPPN sebagai bentuk penerapan *smart city* di Indonesia. Dalam KSPPN (Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional) dijelaskan bahwasannya *smart city* merupakan kota yang dapat menggunakan SDM, media social, dan ICT dalam rangka terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ekonomi yang unggul secara kompetitif, dan juga kehidupan berkualitas dengan kebijaksanaan pengelolaan sumber daya (PUPR, 2015).

Tabel 1. 1

Daftar Kota/ Kabupaten Perintis *Smart city*

No	Kabupaten/ Kota	No.	Kabupaten/ Kota
1	Kota Jambi	14	Kabupaten Sleman
2	Kabupaten Pelalawan	15	Kota Semarang
3	Kabupaten Siak	16	Kabupaten Banyuwangi
4	Kabupaten Banyuasin	17	Kabupaten Bojonegoro
5	Kota Tangerang	18	Kabupaten Gresik
6	Kota Tangerang Selatan	19	Kabupaten Sidoarjo
7	Kabupaten Purwakarta	20	Kabupaten Badung
8	Kota Bandung	21	Kota Singkawang
9	Kota Bekasi	22	Kabupaten Kutai Kartanegara
10	Kota Bogor	23	Kota Samarinda
11	Kota Cirebon	24	Kota Makassar
12	Kota Sukabumi	25	Kota Tomohon
13	Kabupaten Mimika		

Sumber: indonesiabaik.id

Pada tahun 2017, pemerintah pusat melalui kolaborasi antarinstansi merancang inisiatif bertajuk Gerakan Menuju 100 *Smart city* sebagai langkah awal pembangunan kota cerdas di Indonesia. Inisiatif ini melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, serta Kantor Staf Presiden. Dalam pelaksanaan tahap pertamanya, sebanyak 25 kabupaten/kota dipilih untuk menerima pendampingan dalam menyusun dokumen Masterplan *Smart city*. Wilayah-wilayah tersebut dikenal sebagai “Kota Perintis *Smart city*”, sebagaimana dicantumkan pada Tabel 1.1.

Dalam pengembangan *smart city*, terdapat enam kategori utama, yaitu *smart economy*, *smart environmental practices*, *smart governance*, *smart living*, *smart mobility*, dan *smart people*. Setiap aspek tersebut memainkan peran krusial dalam membentuk kota yang lebih efisien, berkelanjutan, serta berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dimensi *smart economy* dalam konsep *smart city* bertujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dengan mengadaptasi perubahan di era digital, sehingga sektor ekonomi unggulan daerah dapat berkembang secara optimal (Dirjen Aptika, 2021). Penelitian ini memilih *smart economy* sebagai fokus utama karena kontribusinya yang signifikan dalam memperkuat keunggulan kompetitif daerah, menciptakan kesempatan kerja baru, serta mendorong perkembangan ekonomi yang merata dan berkesinambungan.

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan penelitian menggunakan *systematic literature review* untuk merangkum dimensi dan indikator dari *smart economy*. Penelitian Indrawati dkk. (2018) mengidentifikasi 10 variabel dan 34 indikator dalam *smart economy*. Sedangkan Bahari *et. al* (2020) mengidentifikasi 3 sub dimensi dan 18 indikator untuk dimensi *smart economy* ini. Dalam peneltitian

Firmansyah dan Suryani (2017) yang mengidentifikasi model sistematis dalam menilai keberhasilan *smart economy* di Indonesia diperoleh tiga indikator, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator-indikator yang dikemukakan oleh Firmansyah & Suryani (2017) juga dijelaskan dalam penelitian sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan sejauh mana otonomi daerah berhasil diterapkan, sekaligus menjadi sumber utama dalam mendanai berbagai program pembangunan di tingkat regional. PAD adalah parameter dalam keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat PAD maka semakin mandiri wilayah tersebut yang memperlihatkan ketergantungan pembangunan daerah terhadap pemerintah pusat. (Ramadhan *et al.*, 2022). Inovasi dan pemanfaatan sektor ekonomi daerah yang tepat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Hal tersebut sejalan dengan sasaran *smart economy* yang diungkapkan oleh Dirjen Aptika, (2021). Diperlukan juga inovasi teknologi agar dapat memudahkan pengelolaan dan meningkatkan pendapatan daerah. Dalam hal ini *smart city* dan *smart economy* dapat dijadikan solusi pengembangan kota dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, PAD seluruh wilayah di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2023. Meskipun terjadi penurunan tahun 2020, PAD sempat naik tahun 2019 yang dapat diindikasikan bahwasannya program Gerakan menuju 100 *Smart city* ini berdampak pada perekonomian daerah, terkhususnya Pendapatan Asli Daerah. Penurunan pada tahun 2020 ini diakibatkan oleh COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Kemudian, PAD ini naik secara konsisten dari tahun 2021 sampai 2023

Gambar 1. 1

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia

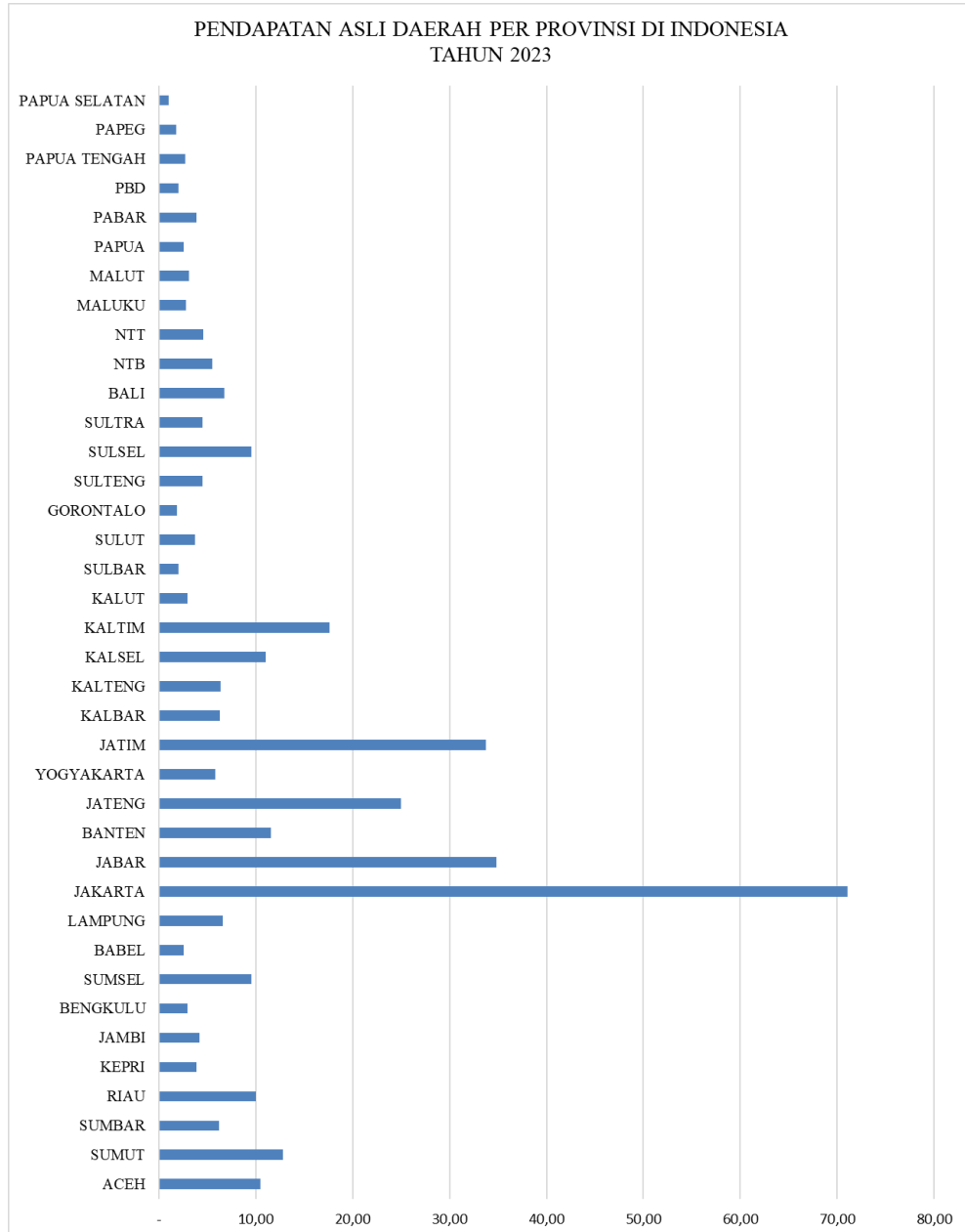


Sumber: bps.go.id

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada **gambar 1.2** menunjukkan adanya ketimpangan antarprovinsi di Indonesia, di mana DKI Jakarta memiliki PAD tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Beberapa provinsi seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara memiliki PAD yang jauh lebih rendah, mencerminkan perbedaan dalam kapasitas fiskal dan sumber pendapatan daerah. Tingginya PAD di beberapa daerah dapat disebabkan oleh sektor ekonomi yang lebih berkembang, basis pajak yang lebih luas, serta efektivitas dalam pengelolaan sumber daya daerah. Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam kemampuan daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatannya guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1. 2

Pendapatan Asli Daerah Per Provinsi Indonesia Tahun 2023



Sumber: kemendagri.go.id

Gambar 1.3 memperlihatkan Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten perintis *smart city*, juga mengalami fluktuasi Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Badung memiliki rasio Pendapatan Asli Daerah tertinggi dengan

kenaikan rasio sebesar 4,8% di tahun 2017 dan 2018 (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018). Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya daerah serta optimalisasi sektor-sektor ekonomi unggulan. Rasio PAD yang tinggi menunjukkan bahwa Kabupaten Badung semakin mandiri dalam pembiayaan daerahnya.

Gambar 1. 3
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung



Sumber: badungkab.bps.go.id

Surabaya dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia, ditandai oleh tingginya tingkat urbanisasi dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung penerapan konsep *smart city*. Kota Surabaya aktif mengembangkan ekosistem digital dan transaksi non-tunai, sejalan dengan *smart economy*. **Gambar 1.4** menunjukkan tren PAD Kota Surabaya selama 2017–2023 yang mengalami fluktuasi, dengan peningkatan hingga 2019. Kemudian, penurunan pada 2020 akibat pandemi, dan pemulihan sejak 2021.

Gambar 1. 4

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya



Sumber: surabayakota.bps.go.id

Gambar 1. 5

Pendapatan Asli Daerah Kota Padang



Sumber: padangkota.bps.go.id

Kondisi serupa terjadi di Kota Padang sebagai pusat administrasi, perdagangan, dan jasa di Sumatera Barat. PAD Kota Padang didominasi oleh pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Upaya

sektor perdagangan, pariwisata, serta industri kecil dan menengah turut mendukung pertumbuhan PAD. **Gambar 1.5** menunjukkan fluktuasi PAD selama 2017–2023, dengan peningkatan signifikan setelah pandemi, mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal dan peran Kota Padang dalam perekonomian Sumatera Barat.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas hubungan antara *smart city* dan pertumbuhan ekonomi daerah, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai pengaruh spesifik indikator *smart economy* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada kota dan kabupaten perintis *smart city* di Indonesia. Studi sebelumnya seperti Lim *et al.*, (2024) telah menunjukkan dampak positif *smart city* terhadap dimensi ekonomi di Korea Selatan, sementara Jamil *et al.*, (2021) menemukan bahwa transformasi digital *smart city* meningkatkan jumlah UMKM dan PAD di Kota Makassar. Namun, penelitian mengenai hubungan langsung antara indikator *smart economy* seperti PDRB, TPT, dan IPM dengan PAD di kota-kota perintis *smart city* di Indonesia masih terbatas. Kebanyakan studi sebelumnya lebih berfokus pada hubungan antara penerapan konsep *smart city* secara umum dengan kondisi ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian, penelitian lanjutan diperlukan guna mengisi kekosongan kajian tersebut melalui analisis mendalam terhadap pengaruh indikator-indikator *smart economy* terhadap PAD pada kota dan kabupaten perintis implementasi *smart city* di Indonesia.

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, penelitian ini mengangkat judul **“PENGARUH SMART ECONOMY TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI INDONESIA”**. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak tiga indikator *smart economy* yang terdiri dari PDRB, TPT, dan IPM memiliki pengaruh

dalam memicu terhadap peningkatan PAD di kabupaten dan kota yang telah dibimbing untuk menerapkan *smart city*. Penelitian ini dilakukan dari tahun 2017 yang merupakan awal dipilihnya kabupaten/ kota perintis *smart city* sampai tahun 2023 untuk melihat perbandingan perubahan PAD.

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017-2023 pada kabupaten/ kota perintis *smart city* di Indonesia?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017-2023 pada kabupaten/ kota perintis *smart city* di Indonesia?
3. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017-2023 pada kabupaten/ kota perintis *smart city* di Indonesia?
4. Apakah PDRB, TPT, dan IPM sebagai indikator *smart economy* berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017-2023 pada kabupaten/ kota perintis *smart city* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

“Pengaruh *Smart economy* terhadap Pendapatan Asli Daerah di Indonesia” memiliki tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017-2023 pada kabupaten/ kota perintis *smart city* di Indonesia.

2. Untuk mengetahui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017-2023 pada kabupaten/ kota perintis *smart city* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017-2023 pada kabupaten/ kota perintis *smart city* di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh PDRB, TPT, dan IPM sebagai indikator *smart economy* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017-2023 pada kabupaten/ kota perintis *smart city* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh kontribusi yang meliputi:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat signifikan dalam memperdalam dan memperluas pengetahuan para akademisi serta peneliti mengenai *smart economy* dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi acuan yang berguna untuk studi berikutnya dengan topik serupa, khususnya dalam konteks ekonomi daerah, kebijakan pembangunan, serta mata kuliah terkait seperti Akuntansi Sektor Publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, hal ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait penerapan konsep *smart city* dan *smart economy*. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai faktor peningkatan PAD, pemerintah daerah akan mampu merumuskan

kebijakan ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- b. Bagi Peneliti dan Mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi serta input akademik dalam kajian Akuntansi Sektor Publik, khususnya mengenai optimalisasi penerimaan daerah, transparansi keuangan daerah, dan kebijakan ekonomi daerah.
- c. Bagi Pelaku Usaha dan Investor, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana konsep *smart economy* berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kata lain, UMKM, *startup*, dan para investor dapat memanfaatkan data ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih cermat dan strategis demi mendukung perkembangan ekonomi di tingkat daerah

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini mengkaji pengaruh indikator keberhasilan *smart economy* terhadap PAD dengan meneliti kota-kota perintis *Smart city* pada tahun 2017 selama periode 2017-2023. Variabel independennya yaitu indikator keberhasilan *smart economy* yang meliputi PDRB, TPT, dan IPM. Sementara itu, PAD dijadikan sebagai variabel dependen karena merepresentasikan tingkat kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Batasan penelitian ini bertujuan untuk memastikan fokus kajian yang jelas dan sistematis, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana *smart economy* berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah serta menjadi landasan perumusan kebijakan ekonomi yang lebih efektif di masa depan.

1.6 Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun secara sistematis dengan tujuan menyajikan gambaran yang komprehensif:

Bab I Pendahuluan mengulas latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, batasan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka dijelaskan berbagai teori yang menjadi dasar penelitian, ditelaah studi-studi terdahulu sebagai referensi, dan dirumuskan hipotesis berdasarkan landasan teori serta hasil riset sebelumnya. Selain itu, kerangka penelitian disusun dalam bentuk skema konseptual untuk memperjelas relasi antar variabel yang diteliti.

Bab III Metodologi Penelitian dijelaskan metode penelitian yang dipakai, termasuk jenis penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, definisi operasional variabel, sumber data, cara pengumpulan data, serta bagaimana variabel dioperasionalkan agar analisis berjalan sistematis dan terstruktur.

Bab IV Hasil dan Pembahasan memaparkan hasil penelitian dalam tabel, grafik, dan uraian, serta menganalisisnya berdasarkan teori dan studi sebelumnya untuk menjelaskan makna temuan.

Bab V Penutup merangkum kesimpulan berdasarkan temuan utama dan memberikan saran bagi penelitian selanjutnya maupun pihak terkait. Saran didasarkan pada keterbatasan penelitian serta potensi pengembangan di masa depan, sehingga bab ini menjadi penutup yang komprehensif.